

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi di Pulau Jawa, letaknya diapit oleh dua Provinsi besar, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Letaknya antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Karimunjawa).

Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebagai 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). (BPS, 2018).



Gambar 4.1
Peta Jawa Tengah

Tingkat kemiringan lahan di Provinsi Jawa Tengah, 38% lahan memiliki tingkat kemiringan diantara kemiringan diantara 0-2%, 31% lahan memiliki tingkat kemiringan 2-15%, 19% lahan memiliki tingkat kemiringan diantara 15-40%, dan sisanya 12% lahan memiliki tingkat kemiringan lebih dari 40%. Kawasan pantai Utara Jawa Tengah mempunyai dataran rendah yang sempit. Kota Demak semasa kesultanan Demak (abad ke-16 M) berada di pesisir sehingga menjadi tempat berlabuh bagi kapal. Di bagian selatan kawasan tersebut terdapat pegunungan Kapur dan Kendeng, yaitu Pegunungan Kapur yang membentang dari bagian sebelah timur Semarang.

Rangkaian utama pegunungan di Provinsi Jawa Tengah adalah Pegunungan Serayu Utara dan Serayu Selatan. Pegunungan Serayu Utara membentuk rantai pegunungan. Lebar rangkaian pegunungan ini sekitar 30-50 km, di bagian ujung Barat terdapat gunung Slamet dan bagian Timur merupakan dataran tinggi di kawasan Dieng dengan puncak-puncaknya Gunung Prahur dan Gunung Ungaran. Dipisahkan oleh Pegunungan Serayu yang membentang dari Majenang (Kabupaten Cilacap), Purwokerto, hingga Wonosobo. Di bagian Timur terdapat berapi Sindoro dan Sumbing, dan sebelah timurnya lagi terdapat kawasan Temanggung Dan Magelang, merupakan lanjutan bagian yang membatasi Gunung Berapi dan Gunung Merbabu.

Pada bagian paling Timur pegunungan Serayu Selatan dibentuk oleh kubah pegunungan Kulonprogo (1022m), yang terletak diantara Purworejo dan Sungai Progo, kawasan Pantai Selatan Jawa Tengah juga mempunyai

dataran yang sempit dan rendah, dengan lebar antara 10-25 km. Selain itu juga terdapat kawasan Gombang Selatan. Perbukitan yang membentang sejajar dengan pantai, dari Yogyakarta sampai dengan Cilacap.

B. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah

Tabel 4.1
Laju Peningkatan PDB (Milyar Rupiah) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Persen) Atas Dasar Konstan Tahun 2007-2017

Tahun	PDB (Milyar Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2007	1.964.327	4.8
2008	2.028.456	4.5
2009	2.178.850	3.2
2010	2.314.459	4.9
2011	2.464.566	4.7
2012	2.618.932	4.6
2013	2.769.053	4.1
2014	2.909.181	3.6
2015	3.374.490	4.8
2016	3.605.060	5.0
2017	3.835.630	5.2

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan tabel di atas secara umum kondisi ekonomi Indonesia terbilang cukup fluktuatif. Laju peningkatan PDB Indonesia setiap tahunnya cenderung cukup stabil. Hal ini terlihat dari jumlah PDB Indonesia pada tahun 2007 sebesar 1.964.327 milyar rupiah semakin meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 3.835.630 milyar rupiah pada tahun 2017. Namun hal ini tidak sesuai dengan gejala laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berfluktuatif dan cenderung melambat setiap tahunnya. Terlihat laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 sebesar 4.8 persen melambat hingga

3.6 persen pada tahun 2014. Akan tetapi pada tahun selanjutnya meningkat menjadi 4.8 pada tahun 2015 dan tahun 2017 5.2 persen.

C. Inflasi

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Tingkat inflasi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan yang cukup fluktuatif dimana terjadi lonjakan tingkat inflasi yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Tingkat Inflasi di Kota-Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017

Tahun	Inflasi
2008	9.55
2009	3.32
2010	6.88
2011	2.68
2012	4.24
2013	7.98
2014	8.22
2015	2.73
2016	2.36
2017	3.71

Sumber: Badan Pusat Statistik

Naik turunnya tingkat inflasi yang terjadi menurut, Jam Jam Zamachsyari selaku Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS Jateng, tingkat inflasi pada tahun 2008 cukup tinggi disebabkan oleh harga beras yang tidak kunjung turun setelah lebaran (Antarajateng.com, 2014).

Pada tahun 2013, tingkat inflasi kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi dikarenakan adanya kenaikan harga pada indeks kelompok transport dan komunikasi (Jawa Tengah Dalam Angka, 2014). Sementara pada tahun 2014, menurut Iskandar Simorangkir selaku Wakil Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jateng, pemicu tingginya inflasi disebabkan oleh penyesuaian harga oleh pemerintah antara lain kenaikan tarif tenaga listrik, kenaikan elpiji 12 kg, dan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi faktor lainnya yaitu, disebabkan oleh bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2014 di beberapa kabupaten atau kota di Jateng, serta kemarau panjang yang berdampak pada penurunan hasil panen dan kendala distribusi produk tanaman bahan makanan (Solopos.com, 2015).

D. Jumlah Tenaga Kerja

Tabel 4.3
Jumlah Tenaga Kerja 2008-2017

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)
2008	173406
2009	166101
2010	171309
2011	173390
2012	174309
2013	174060
2014	177164
2015	182926
2016	179145
2017	181990

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Pertumbuhan jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah cenderung fluktuatif. Di tahun 2008 jumlah angkatan kerja sebesar 173406

jiwa mengalami penurunan pada tahun 2009 sebesar 166101 jiwa, namun pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja mengalami kenaikan sebesar 171309 jiwa sampai pada tahun 2017 selalu meningkat secara perlahan. Sedangkan untuk pertumbuhan jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah terlihat lebih stabil dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah angkatan kerjanya.

E. Jumlah Industri

Sektor industri adalah salah satu sektor yang sangat penting di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu dikarenakan sektor industri merupakan penyumbang utama dalam perekonomian di Jawa Tengah. Semakin banyaknya unit usaha baru dan berkembang di suatu wilayah, tentunya akan membutuhkan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja. Dengan begitu, semakin banyaknya unit usaha pada industri pengolahan di Jawa Tengah maka akan meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selain itu jumlah industri di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berikut adalah tabel jumlah unit usaha Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2017.

Tabel 4.4
Jumlah Usaha Binaan Provinsi Jawa Tengah 2008-2017
(Unit Usaha)

Tahun	Jumlah Usaha Binaan (Unit)
2008	64.294
2009	65.878
2010	67.616
2011	70.222
2012	80.583
2013	90.339
2014	99.681
2015	108.937
2016	115.751
2017	133.679

Sumber: BPS Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 4.2, jumlah unit usaha pada sektor industri pengolahan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2008–2017 rata-rata selalu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Di BPS terdapat dua puluh empat golongan pokok sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 dua digit yaitu Makanan, Minuman, Pengolahan tembakau, Tekstil, Pakaian jadi, Barang dari kulit dan alas kaki, Barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, Barang dari kertas, Pencetakan dan reproduksi media rekaman, Produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi, Bahan kimia dan barang dari bahan kimia, Produk obat kimia dan obat tradisional, Barang dari karet dan plastik, barang galian bukan logam, Logam dasar, Barang logam bukan mesin dan peralatannya, Barang elektronik dan dan optik, Peralatan listrik, Mesin dan perlengkapannya, Kendaraan bermotor trailer dan semi trailer, Alat angkutan lainnya, Furnitur, Pengolahan lainnya, Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan.

Dan dari 24 golongan pokok klasifikasi industri berdasarkan Badan Pusat Statistik diatas, terdapat lima komoditi yang mendominasi ekspor pada industri pengolahan di Jawa Tengah, diantaranya adalah benang dan industri tekstil, BBM, industri kayu dan industri gabus, jerami dan peternakan. Sehingga kebanyakan output yang dihasilkan oleh industri pengolahan di Jawa Tengah untuk konsumsi domestik.

F. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima di setiap daerah setiap tahunnya, perolehannya didapatkan dari sektor-sektor unggulan yang berada pada daerah tersebut. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 telah mengatur tentang PAD, didalamnya terdapat peraturan tentang pelimpahan sebagai wewenang pemerintah daerah untuk mengatur serta menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam rangka pembangunan nasional.

Tabel 4.5
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah Tahun 1985-2015

Tahun	PAD (000.000)	Tahun	PAD (000.000)	Tahun	PAD (000.000)
1985	Rp59.865	1996	Rp460.084	2007	Rp2.970.031

1986	Rp68.220	1997	Rp479.912	2008	Rp4.057.776
1987	Rp77.198	1998	Rp381.207	2009	Rp3.716.053
1988	Rp89.780	1999	Rp468.596	2010	Rp4.417.869
1989	Rp115.311	2000	Rp505.660	2011	Rp5.088.713
1990	Rp150.889	2001	Rp832.261	2012	Rp6.629.308
1991	Rp171.001	2002	Rp1.241.735	2013	Rp8.212.801
1992	Rp192.152	2003	Rp1.494.936	2014	Rp9.916.358
1993	Rp241.138	2004	Rp1.865.404	2015	Rp11.696.822
1994	Rp318.965	2005	Rp2.491.396		
1995	Rp391.939	2006	Rp2.632.456		

Sumber: Data BPS Jawa Tengah.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya mengalami peningkatan, hanya saja ketika terjadi krisis global tahun 1998 menyebabkan PAD Provinsi Jawa Tengah sempat mengalami penurunan. Pada tahun 1997 PAD di Jawa Tengah yakni sebesar Rp479.912 (Juta Rupiah), namun karena adanya krisis global menyebabkan PAD turun menjadi Rp381.207 (Juta Rupiah) di tahun 1998. Akan tetapi setelah adanya orde reformasi potensi perekonomian daerah dapat kembali naik lagi pada posisi Rp468.596 (Juta Rupiah) di tahun 1999. Hal ini terus tercermin dan menunjukkan arah yang positif setiap tahunnya, PAD di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan setiap tahunnya hingga pada tahun 2015 mencapai angka Rp11.696.822 (Juta Rupiah).